

SINOPSIS

Hubungan pusat dengan daerah yang diatur melalui UU No. 32/2004 masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Dimana masih banyak menyisakan persoalan menyangkur pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Karenanya, pemerintah mengeluarkan PP No. 6/2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dimana dalam PP ini terdapat tiga evaluasi, salah satunya EKPOD. EKPOD merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam hal ini penulis menjadikan Kabupaten Sleman sebagai unit analisa datanya. Mengingat Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang potensial dengan PAD tertinggi kedua setelah Kabupaten Bantul, presentase tertinggi pegawai dengan tingkat pendidikan Pascasarjanya, memiliki jumlah penduduk terbanyak, dan sebagai Kabupaten dengan kondisi geografis strategis di Provinsi DIY.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif (deskriptif). Dengan jenis data sekunder, mengingat data-data yang ada bentuknya berupa dokumen-dokumen. Data sekunder didapatkan dengan cara melakukan dokumentasi dan studi pustaka. Unit analisis datanya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan kinerja otonomi daerah pada tahun 2008. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan dokumentasi. Dokumentasi diperoleh dari data-data BPS (DIY dan Kabupaten Sleman) dan data dari Bappeda Kabupaten Sleman. Yang selanjutnya teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari BPS dan Bappeda atau sering disebut dengan menganalisis data sekunder.

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang berada dalam kategori baik adalah Aspek Pemerataan Ekonomi, Laju Inflasi, Pendidikan, Kesehatan, dan Olahraga. Pada Aspek Pelayanan Umum adalah Aspek Pendidikan Dasar, Rasio Posyandu, Pelayanan Penunjang, Ketenagakerjaan, Pertanahan dan Perpustakaan. Dalam Aspek Daya Saing Daerah adalah Aspek Kemampuan Ekonomi Daerah, Ketersediaan Restoran, Pajak Daerah, Perda Penujang Investasi, dan Sumber Daya Manusia. Sementara yang berkategori kurang baik pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat adalah Aspek Ketimpangan Kemakmuran Pada 20 Persen Tertinggi, Kesehatan, Kriminalitas, dan Seni Budaya. Pada Aspek Pelayanan Umum adalah Aspek Pendidikan Menengah, Rasio Tenaga Medis, Lingkungan Hidup, Rasio Wartel dan Warnet, Keberadaan LSM. Dan pada Aspek Daya Saing Daerah adalah Aspek Rasio Jalan, dan Ketersediaan Hotel Bintang 5.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja otonomi daerah Kabupaten Sleman secara keseluruhan pada tahun 2008 masih kurang baik, karena pencapaian kerjanya masih banyak yang belum memenuhi target sesuai dengan apa yang terdapat pada indikator PP No. 6/2008. Maka sebagai bentuk rekomendasi, di tahun berikutnya PEMDA Kabupaten Sleman harus melakukan perbaikan kinerja dalam aspek-aspek yang masih berada dalam kategori kurang tersebut, terutama memprioritaskan aspek kesempatan kerja, kesenjangan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan, menekan angka kemiskinan, memperbanyak tenaga medis, dan menekan angka kriminalitas.